

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Secara umum lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat (Wiwoho, 2014).

Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan di Provinsi Bali, dibentuklah lembaga keuangan mikro bukan bank yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjalankan salah satu fungsi keuangan Desa Pakraman yaitu mengelola sumber daya keuangan milik Desa Pakraman dalam bentuk simpan pinjam untuk keperluan pembiayaan kehidupan anggota masyarakat Desa Pakraman, baik secara personal maupun secara bersama-sama dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural dan keagamaan masyarakat Desa Pakraman.

Kepemilikan LPD didominasi oleh krama desa. Krama desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. LPD dikelola secara terpisah dengan krama desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Menurut Shil (2008), konflik keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Seperti penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak pengurus LPD yang tentu akan merugikan banyak pihak, pihak yang paling dirugikan dalam masalah ini ialah para nasabah LPD tersebut.

Pengurus LPD harus senantiasa meningkatkan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan sesama LPD atau lembaga keuangan lainnya sehingga dapat semakin berkembang. Diperlukan upaya penyehatan dan penyempurnaan dalam hal produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus selalu mengembangkan dan meningkatkan berbagai kebijakan dan strategi yang dimilikinya agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Menurut Shil (2008), konflik keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan perusahaan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Untuk memperkecil munculnya konflik keagenan maka diperlukan pengelolaan usaha (*corporate governance*) yang baik dan diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara agen dan prinsipal. Menurut Setyawan (2013), dengan pengelolaan manajemen yang baik, maka kinerja keuangan diharapkan menjadi baik. Penerapan *Good*

Corporate Governance (GCG) akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tercermin pada kinerja keuangan.

Keunikan LPD ada pada aspek kepemilikan dan proses pengambilan keputusan. Kepemilikan bukan oleh perorangan dan pengambilan keputusan tidak berdasarkan saham kepemilikan. Organisasi ini mengintegrasikan suatu *specific society culture* dan manajemen unik melalui nilai-nilai komunikasi dan secara jelas menampilkan sosok bangunan informasi dan aktivitas budaya yang mengandung unsur keyakinan dan karma. LPD menjadi salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang pesat di Provinsi Bali, terutama di Kabupaten Badung sebagai pusat usaha sektor informal, telah berdiri sejak 1988 berdasarkan peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pentingnya penerapan seluruh prinsip GCG dalam pengelolaan LPD memberikan dampak yang jelas bagi LPD untuk pengambilan keputusan secara bertanggungjawab. Maka dari itu penerapan dari GCG sangat berpengaruh untuk pengelola LPD sehingga menjadi lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya (Dewi, 2014).

Berdasarkan pada data LPLPD Provinsi Bali pada tahun 2021-2022 semua LPD di Kecamatan Mengwi, Badung dinyatakan beroperasi, namun dalam praktiknya terdapat beberapa LPD yang terdata dengan kondisi yang tidak sehat. Kemudian pada awal tahun 2023 terdapat salah satu LPD di Kecamatan Mengwi, Badung yang tidak beroperasi yang terlibat kasus

manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh oknum pengurus LPD tersebut.

Berdasarkan dari TribunBali.com (2023) LPD Serangan terjerat kasus hukum yaitu pemakaian anggaran yang tidak pas dengan membuat 17 kredit palsu dan melancarkan manipulasi pembukuan buku kas. Sehingga pada awal tahun 2023 LPD di Serangan harus tutup karena terjerat kasus hukum yang menandakan terdapat penurunan mutu Kinerja pada LPD di Kecamatan Mengwi, Badung yakni terjadi penyajian laporan keuangan dengan tidak jujur.

Kasus tersebut mengindikasikan bahwa manajemen memiliki kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan demi keuntungan pribadi serta melaksanakan proses pengambilan keputusan secara sepihak. Kasus yang terjadi adalah manajemen menutupi informasi yang sebenarnya sehingga informasi tersebut tidak relevan digunakan dalam pengambilan keputusan serta manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat serta LPD tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut penting bagi LPD untuk dapat memiliki tata kelola lembaga yang baik. Tata kelola lembaga yang baik tentunya tidak terbentuk begitu saja.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 *Good Corporate Governance (GCG)* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan berlandaskan peraturan perundang undangan dan etika berusaha. GCG adalah suatu tata kelola untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas perusahaan. Prinsip-prinsip

GCG menjadi faktor dibutuhkan untuk menciptakan pasar yang efisien, transparan, dan konsisten yang sesuai dengan perundang-undangan. Agar tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat tercapai, prinsip-prinsip GCG yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan adalah Transparansi. Pengungkapan laporan tahunan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan pengungkapan yang bersifat sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Amrin, 2018). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melebihi pengungkapan wajib yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku (Amrin, 2018). Pada penelitian Chandra, dkk. (2019), Putri, dkk. (2023), Wulandari, dkk. (2021) menemukan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Sains (2018) menemukan bahwa Transparansi memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Sanah, dkk. (2021) menemukan bahwa Transparansi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pada perusahaan.

Prinsip kedua dalam GCG adalah Akuntabilitas, yang merupakan sebuah keadaan di mana perusahaan mampu mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang mereka buat. Akuntabilitas merupakan sebuah keadaan dimana terbentuk sebuah sistem pengendalian yang baik didalam perusahaan sehingga tercipta sebuah keseimbangan kekuasaan Putri (2023). Penelitian Sumadi, dkk. (2022), Purwanti, dkk. (2022), Putri,

dkk. (2023), Azizah, dkk. (2023) menemukan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan Wahyuni, dkk (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Prinsip selanjutnya yang menjadi faktor adalah Responsibilitas yang merupakan sikap perusahaan dalam mengelola usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance* (Putri, dkk. 2021). Penelitian Putri, dkk. (2023), Handayani, dkk. (2020) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ariani, dkk. (2020) menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Prinsip selanjutnya yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan adalah Independensi. Independensi adalah suatu keadaan dimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun terutama, pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporas yang sehat. Penelitian Putri, dkk. (2023), Ramadhani, dkk. (2022) menemukan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, Penelitian Ishak (2018) menemukan bahwa independensi berpengaruh negatif

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Rudiwantoro (2022) menemukan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Prinsip yang menjadi faktor selanjutnya adalah Kewajaran, yang merupakan keadilan dan kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Astuti, 2023). Perusahaan harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik. Penelitian Marlina (2019) menyatakan bahwa kewajaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Astuti, dkk. (2023) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tertentu. Namun, penerapan GCG pada LPD dapat merujuk pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006. Pedoman ini menetapkan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi menekankan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan dan material. Akuntabilitas mengharuskan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Independensi menuntut pengelolaan

perusahaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Sedangkan kewajiban menjamin keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, penerapan prinsip-prinsip GCG

Kinerja perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan sehingga tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi?

5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmu akuntansi khususnya pengaruh prinsip-prinsip GCG.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi masukan bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung akan pentingnya penerapan Good Corporate Governance bagi kelangsungan hidup perusahaan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Salah satu teori yang berhubungan dengan *corporate governance* adalah teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu menggaji individu lain (karyawan atau agen) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya (Purwantini, 2012). *Corporate Governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang diinvestasikan (Herawaty, 2008).

Kinerja suatu perusahaan yang baik akan tercapai apabila terdapat praktek-praktek pemerintahan yang baik juga. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pemantauan dan perlindungan yang lebih baik kepada para pemegang sahamnya (Haat, 2008). Konsep *agency theory*, manajemen sebagai agen semestinya menjunjung tinggi kepentingan *stakeholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas.

Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan seperti penyalahgunaan kewenangan, pennggelapan sumber daya yang secara keseluruhan dalam jangka panjang

dapat merugikan kepentingan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola istilah yang disebut *agency problem* (Siallagan, 2006). Hubungan antara pemegang saham dan manajer memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan agensi. Hubungan agensi ini berkaitan dengan pemisahan kepemilikan dan pengawasan dalam struktur perusahaan. Adanya perilaku dari manajer atau agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain atau pemilik, dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan atau *stakeholders* (Ujiyanto, 2005). Adanya *asymmetric information* dan sikap mementingkan diri sendiri pada manajer atau agen, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada pemilik perusahaan (Ujiyanto, 2005).

Berdasarkan keadaan tersebut, dibutuhkan system tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan (*good corporate governance*) yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan *corporate* yang terbuka dan *accountable* sehingga pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengkaji berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan tersebut, serta menilai keefektifan keputusan yang telah diambil oleh manajemen (Riyanto, 2005). Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditur untuk

memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (Darmawati, 2002). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori agency dikarenakan Akuntabilitas *Corporate Governance*, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang diinvestasikan.

2.1.2 Pengertian Kinerja

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Kinerja LPD dapat dinilai dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif keuangan melibatkan penilaian kinerja melalui rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Perspektif pelanggan menilai kepuasan pelanggan melalui kuisisioner. Perspektif proses bisnis internal menilai kinerja internal, sementara perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menilai kinerja dari segi sumber daya manusia, prosedur, organisasi, dan sistem (Mangkunegara, 2010).

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit dan perspektif yang luas, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Oliver (1995), *corporate*

governance muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi, atau konflik kepentingan, yang melibatkan anggota organisasi.

Menurut *Organizational for Economic Co-operation and Development* (OECD, 1999), *corporate governance* merupakan suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksinya (dewan direksi dan komisaris), untuk negara-negara yang menganut sistem hukum *two-tier*, termasuk Indonesia), para pemegang sahamnya dan *stakeholders* lainnya. *Good corporate governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi *monitoring* yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien.

Konsep GCG mengacu pada peraturan dan standar yang mendefinisikan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan seperti karyawan, pemasok, kreditur, konsumen, pemegang saham, pemegang obligasi (Kim, 2006). Menurut Thomas (2006), *good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Menurut Purwani (2010), jika pelaksanaan *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga kinerja perusahaan baik yang bersifat finansial maupun *non* finansial akan juga turut membaik.

2.1.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Forum *For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang biasa diperoleh, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan layanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.1.5 Hubungan Antar Masing-masing Variabel

Berikut ini merupakan hubungan diantara masing-masing variabel dengan kinerja LPD, yaitu:

1. Hubungan Transparansi dan Kinerja LPD

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya (Danari, 2014).

2. Hubungan Akuntabilitas dan Kinerja LPD

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (Danari, 2014).

3. Hubungan Responsibilitas dan Kinerja LPD

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (Danari, 2014).

4. Hubungan Independensi dan Kinerja LPD

Melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Danari, 2014).

5. Kewajaran dan Kinerja LPD

Melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Dainiri, 2014).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan karena dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tjua dan Masdjojo (2020) membahas tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2017-2021” penelitian ini bertujuan untuk Meneliti pengaruh penerapan prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah Regresi linier dengan variabel dependen ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Penerapan GCG yang lebih baik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.
2. Lestari dan Purwantini (2023) membahas tentang “Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan: Studi Empiris pada KSP di Kabupaten Magelang”. Tujuan penelitian adalah Menganalisis pengaruh Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Risiko, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan

pada KSP di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* terhadap 75 responden, dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Dari penelitian di dapatkan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan rensponsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

3. Titania dan Taqwa dkk. (2023) yang membahas tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021, sedangkan Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
4. Fajri dan Mariadi (2022) yang membahas tentang “ *Pengaruh Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bumn Sektor Keuangan” tujuan penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yang menjelaskan kausalitas antar variabel penelitian dengan

pendekatan kuantitatif. Dari penelitian Variabel komisaris independen berpengaruh tidak signifikan karena komisaris independen tidak benar-benar independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya padahal secara fundamental integritas dan independensi adalah hal utama yang wajib dimiliki agar *good corporate governance* dalam perusahaan dapat terwujud secara optimal.

5. Anggardani, dkk. (2024) yang membahas tentang “ Pengaruh *Good Corporate Governance*, Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Tabanan” Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh *Good Corporate Governance*, Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Tabanan. Peneliti menerapkan metode penelitian kuantitatif, di mana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk angka. Didasarkan hasil pengujian di atas bisa dijelaskan bahwa GCG, Budaya organisasi, dan Komitmen organisasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD di Kabupaten Tabanan.
6. Padang, dkk. (2023) yang membahas tentang “ Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023”. Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Metode

penelitian yang digunakan adalah Regresi berganda dengan rasio profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel dependen. Dari penelitian diperoleh Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan *good corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), *intellectual capital* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

7. Nopriani dan Lestari (2024) yang membahas “Pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh (Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit), Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023” Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis Pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh (Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit), Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Dari penelitian didapatkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi dan Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

8. Honi, dkk. (2020) yang membahas tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018”. Tujuan Penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional tahun 2014-2018. Metode penelitian Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu menggunakan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang digunakan adalah 66 Bank Umum Konvensional. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian uji secara parsial menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan Komite Pemantau Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dan uji simultan menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan..
9. Fitrianiingsih dan Asfaro (2022) yang membahas tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan Penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Dampak Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Kinerja Keuangan terhadap perusahaan

perbankan dasar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 data. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa *good corporate governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan return on asset (ROA) di perusahaan perbankan.

10. Amelinda dan Anwar (2021) yang membahas tentang “ Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia” . Penelitian ini bertujuan Tujuan penelitian ini untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh dari penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Teknik analisis data pada riset ini menggunakan analisis data berupa data panel. Penelitian memperoleh hasil bahwa hanya dewan komite audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil lain membuktikan bahwa *good corporate governance* memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada Variabel Y yaitu Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah terletak lokasi penelitian , tahun penelitian dan Variabel independen